

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian.

Sejarah perkembangan akuntansi berkembang pesat setelah terjadinya revolusi industri di Inggris (1760-1860), ini menyebabkan pelaporan akuntansi lebih banyak digunakan sebagai alat pertanggungjawaban kepada pemilik modal sehingga mengakibatkan orientasi perusahaan lebih berpihak kepada pemilik modal. Pelaporan akuntansi juga dipergunakan sebagai laporan dalam pengajuan pinjaman kepada pihak kreditur serta pedoman perusahaan untuk mengambil keputusan. Pengungkapan wajib merupakan hal penting bagi perusahaan jasa karena sektor jasa telah mulai berkembang pesat seperti perusahaan manufaktur, sehingga menarik para investor untuk menanamkan modal pada sektor jasa menurut Haryono (2006). Perkembangan ini membuat sektor jasa membutuhkan sumber pendanaan dari kreditor dan investor. Untuk melindungi kepentingan *stakeholders* diperlukan adanya peraturan tentang pengungkapan wajib dalam laporan keuangan karena tanpa peraturan ini dapat membuat perusahaan menyembunyikan informasi penting yang seharusnya diungkapkan.

Informasi yang tidak diungkapkan dapat merugikan *stakeholders*, berdasarkan penelitian Prayogi (2011) salah satu kasus yang terjadi yaitu PT Petromine Energy Trading (anak perusahaan PT Bakrie & Brothers, Tbk) yang tidak mencantumkan pendapatan dari jasa penyediaan bahan bakar kepada AKR Corporindo senilai Rp 1,370 triliun, dengan menggunakan beban pokok pendapatan

sebesar Rp 8,000 triliun. Akibat kasus ini, Bakrie & Brothers mendapatkan sanksi sebesar Rp 4,000 miliar dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.

Laporan keuangan (*financial statement*) menurut IAI (2002) merupakan bentuk utama dari pelaporan keuangan yang bertujuan untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah pemakai dalam pengambilan keputusan dan memenuhi kebutuhan informasi yang berguna bagi pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) dalam karakteristik perusahaan yang berbeda dengan eksistensi perusahaan, termasuk diantaranya investor, kreditor, dewan komisaris yang mewakili para pemegang saham dan pihak lain yang menggunakan laporan keuangan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Investor sehubungan dengan keputusan untuk membeli, menjual dan menyimpan surat-surat berharga (*marketable securities*), sedangkan kreditor berkepentingan dengan keputusan untuk memberi atau menolak, perpanjang kredit dan mengambil keputusan lain terhadap kredit yang diberikan kepada debitornya. Dewan komisaris mewakili para pemegang saham sehubungan dengan kewenangannya untuk menerima atau menolak kebijakan (*policy*) yang diusulkan oleh pihak direksi.

Para kreditor berkepentingan terhadap laporan keuangan perusahaan yang menjadi debitur atau nasabahnya. Sebelum mengambil keputusan untuk memberi atau menolak permintaan kredit dari suatu perusahaan, kreditor perlu mengadakan analisis terlebih dahulu terhadap laporan keuangan dari perusahaan tersebut untuk dapat mengukur kemampuan perusahaan dalam pengembalian pokok dan beban

bunganya. Dalam mengadakan analisis laporan keuangan perusahaan, kreditur memerlukan adanya ukuran tertentu. Ukuran yang sering digunakan dalam analisis laporan keuangan adalah rasio *leverage*. Menurut Riyanto (1995) Rasio *leverage* adalah rasio-rasio untuk mengukur sejauh mana perusahaan dibiayai oleh hutang. Rasio *leverage* mencakup *total debt to equity ratio*, *total debt to total capital assets*, *long term debt to equity ratio*, *longible assets debt coverage*, dan *times interest earned ratio*. Investor pun berkepentingan terhadap laporan keuangan perusahaan dalam rangka penentuan kebijakan penanaman modal.

Struktur modal sebagai salah satu variabel independen penelitian dapat menggambarkan proporsi perusahaan dalam menentukan pemenuhan kebutuhan belanja dengan sumber pendanaan jangka panjang, baik yang berasal dari dana internal maupun dana eksternal kemudian struktur modal dapat diperoleh dengan mengurangi struktur keuangan dengan utang jangka pendek.

Pengungkapan perusahaan dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu pengungkapan wajib dan pengungkapan sukarela. Dalam penelitian kali ini peneliti akan menggunakan pengungkapan wajib sebagai variabel dependen dan struktur corporate governance sebagai salah satu variabel independen. Struktur corporate governance adalah berbagai macam susunan kepengurusan dalam perusahaan yang dapat berperan sebagai pihak penggerak sekaligus pengawas dalam perusahaan. Sesuai dengan pengertian Struktur yang pertama menurut kamus besar bahasa Indonesia struktur adalah cara sesuatu disusun atau dibangun; susunan; bangunan.

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dibiyanoro (2011) variabel yang dipergunakan dalam *Mandatory disclosure* adalah struktur modal dan

profitabilitas yang sama-sama berkedudukan sebagai variabel independen dan pengujian dilakukan pada perusahaan manufaktur di Indonesia. Subroto (2003) melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan kepada ketentuan pengungkapan wajib oleh perusahaan-perusahaan publik dan implikasinya terhadap kepercayaan para investor di pasar modal. Dalam penelitian ini diukur dengan *leverage*, profitabilitas, kepercayaan investor dan indeks pengungkapan wajib yang menghasilkan pengaruh negatif.

Dalam penelitian yang dilakukan Prawinandi, Suhardjanto, dan Triatmoko (2012) terdapat penjelasan mengenai penelitian terdahulu yang dilakukan peneliti lain mengenai tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* IFRS dimana sudah dilakukan oleh Tsalavoutas *et al.* (2008) di Yunani; Al-Akra *et al.* (2010) di Yordania; Tsalavoutas dan Dionysiou (2011) di Yunani, namun belum pernah dilakukan di Indonesia. Pengaruh struktur *corporate governance* terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* IFRS pernah diteliti oleh Al-Akra *et al.* (2010) namun variabel struktur *corporate governance* yang digunakan hanya ukuran dewan dewan komisaris, proporsi komisaris independen dan komite audit.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, dalam penelitian kali ini akan menggabungkan beberapa variabel dalam penelitian terdahulu menjadi variabel independen. Penelitian kali ini hanya akan menggunakan struktur modal dan struktur *corporate governance* dalam menguji ketaatan *mandatory disclosure*. Hasil dari penggabungan variabel tersebut menghasilkan penelitian yang berjudul “Pengaruh Struktur Modal Dan Struktur *Corporate Governance* Terhadap Ketaatan *Mandatory Disclosure*”.

B. Batasan Masalah Penelitian.

Dalam penelitian ini pengukur dalam ketaatan *mandatory disclosure* adalah rasio *leverage* sebagai proxy dalam struktur modal, dan beberapa faktor dalam *corporate governance* diantaranya yaitu jumlah anggota dewan komisaris, proporsi komisaris wanita, proporsi komisaris independen, jumlah rapat dewan komisaris, latar belakang pendidikan komisaris utama, jumlah komite audit, dan proporsi komite audit independen. Proxy pengukuran ketaatan *mandatory disclosure* sebagai variabel dependen adalah Indeks Kelengkapan Pengungkapan.

C. Rumusan Masalah Penelitian.

1. Apakah struktur modal berpengaruh positif terhadap ketaatan *mandatory disclosure* ?
2. Apakah jumlah anggota dewan komisaris berpengaruh positif terhadap ketaatan *mandatory disclosure* ?
3. Apakah proporsi komisaris wanita berpengaruh positif terhadap ketaatan *mandatory disclosure*?
4. Apakah proporsi komisaris independen berpengaruh positif terhadap ketaatan *mandatory disclosure* ?
5. Apakah jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh positif terhadap ketaatan *mandatory disclosure* ?
6. Apakah latar pendidikan komisaris utama berpengaruh negatif terhadap ketaatan *mandatory disclosure* ?

7. Apakah jumlah komite audit berpengaruh positif terhadap ketaatan *mandatory disclosure* ?
8. Apakah proporsi komite audit independen berpengaruh positif terhadap ketaatan *mandatory disclosure* ?

D. Tujuan Penelitian.

Mendapatkan bukti empiris dari :

1. Untuk menguji pengaruh positif struktur modal terhadap ketaatan *mandatory disclosure*
2. Untuk menguji pengaruh positif jumlah anggota dewan komisaris terhadap ketaatan *mandatory disclosure*
3. Untuk menguji pengaruh positif proporsi komisaris wanita terhadap ketaatan *mandatory disclosure*
4. Untuk menguji pengaruh positif proporsi komisaris independen terhadap ketaatan *mandatory disclosure*
5. Untuk menguji pengaruh positif jumlah rapat dewan komisaris terhadap ketaatan *mandatory disclosure*
6. Untuk menguji pengaruh negatif latar pendidikan komisaris utama terhadap ketaatan *mandatory disclosure*
7. Untuk menguji pengaruh positif jumlah komite audit terhadap ketaatan *mandatory disclosure*
8. Untuk menguji pengaruh positif proporsi komite audit independen terhadap ketaatan *mandatory disclosure*

E. Manfaat Penelitian.

1. Manfaat Teoritis.

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat penambah pengetahuan pembaca mengenai struktur modal, struktur *corporate governance*, profitabilitas serta *mandatory disclosure*. Hasil penelitian ini juga diharapkan bisa memberikan penjelasan kepada pembaca mengenai pengaruh struktur modal dan struktur *corporate governance* terhadap ketaatan *mandatory disclosure* serta memberikan gambar mengenai tingkat ketaatan *mandatory disclosure* pada perusahaan manufaktur di Indonesia.

2. Manfaat Praktis.

Menyediakan informasi pada BAPEPAM-LK serta pihak lain yang terkait mengenai informasi tingkat ketaatan perusahaan dalam melaporkan *mandatory disclosure*, menyampaikan informasi untuk mengetahui tingkat kepatuhan perusahaan manufaktur dalam melaporkan pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*).

3. Bagi Investor

Menyediakan informasi sebanyak-banyaknya serta bermanfaat bagi investor atau pemilik modal dalam mempertimbangkan suatu keputusan investasi pada perusahaan manufaktur di Indonesia.